

ISSN : 1411-8041

HUKUM ISLAM

*Pekanbaru Riau Indonesian
Journal For Islamic Law*



Volume. 9 No. 7
Desember 2003

HUKUM ISLAM

Pekanbaru - Riau - Indonesia Journal For Islamic Law

Vol. 9 No. 7 Desember 2003

Editorial Board

Amir Syarifuddin (IAIN Padang)
Alaiddin Koto (IAIN Pekanbaru)
Huzaimah Tahido Yanggo (UIN Jakarta)
Al-Yasa' Abu Bakar (IAIN Banda Aceh)
Akh-Minhaji (IAIN Yogyakarta)
Nasaruddin umar (UIN Jakarta)
Mahdini Sani (IAIN Pekanbaru)

Editor in Chief

Muhammad Said Musa

Editors

Pardi Syamsudin
Hajar Hasan
Mohd. Yunus
Helmi Karim
A. Syafii Jafri

Assistant To The Editors

Saipuddin
Dahlan Y

Language Advisors

Muh. Tawaf
Suryani
Riswani
Nursalim

Cover Design

Nurfaiza!
Muhhamd Said Musa

Jurnal Hukum Islam. Diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru SK. Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru No. 36/R/2003, tertanggal 19 Maret 2003

Hajar Hasan

Eksistensi Zakat Dalam Syariat Islam

Abstract:

The value that is contained in Islamic law forms a complete system to arrange and organize human life, in this case reflected on stressing of the important of incividual balance and society in a social order of society by arrangement of tithe. By processing the professional of tithe make the strong social relationship between the given and the receiver if tithe.

A. Pendahuluan

Salah satu kratristik Islam yang menempatkannya sebagai agama paripura adalah ajarannya meliputi segala sapek kehidupan manusia, baik kehidupan ukhrawi (hablum minallah) atau kehidupan duniawi (hablum minannas). Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang lengkap untuk mengatur dan menata kehidupan manusia, ¹ baik bersifat individu atau dalam kehidupan bermasyarakat. Ini berarti bahwa Islam membawa ajaran yang menyeluruh dan terpadu. Islam tidak pernah membagi kehidupan dalam dua kutub yang terpisah antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Dalam islam keduanya merupakan satu kesatuan yang integral, yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Lengkapnya aturan yang disodorkan Islam tadim, tercermin pada penekanan terhadap pentingnya keseimbangan individu dan masyarakat

dalam satu tatanan sosial yang harmonis. Ini berarti, bahwa Islam pada satu sisi memandang setiap individu bertanggung jawab kepada Allah, tetapi pada sisi lain iapun dituntut untuk mengembangkan tanggung jawabnya terhadap sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kewajiban bagi mereka yang mampu memperhatikan dan menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka yang belum mampu, disalurkan melalui zakat.

Harta yang diambil dari orang-orang kaya dengan porsetase tertentu itu yang kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerimanya adalah salah satu jawaban yang tepat mengatasi masalah kemiskinan umat Islam. Sebab, zakat bukan semata membersihkan jiwa dan harta pelakunya,² tetapi mampu menciptakan kondisi sosial yang lebih baik, dan membangun persaudaraan yang kuat antara si pemebri dan penerima zakat. Dengan demikian zakat tidak dapat hanya bernuasa ibadah tapi juga bernuansa sosial.

B. Konsep Zakat Dalam Perspektif Islam

Kata zakat dilihat dari segi bahasa artinya “Suci, “tumbuh” (berkembang) dan “berkah”.³ Kata Wahidi, yang terkuat adalah arti “tumbuh” (berkembang). Ini berarti jiwa orang yang berzakat dan harta kekayaannya menjadi bersih dan bertambah. Firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya “*Pungutlah zakat dari kekayaan mereka dengan berzakat dapat membersihkan diri dan mensucikan hartanya.*”

Kata zakat mempunyai dua fungsi. Pertama, mensucikan diri dari sifat bakhil dan serakah, sebaliknya memotivasi orang untuk mengeluarkan zakat hartanya, karena zakat itu merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Kedua, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi.⁴ Dengan demikian, zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial yang tinggi dalam diri manusia.

Islam mengadakan klasifikasi tentang pengertian kata shadaqah yang terdapat dalam nash. Shadaqah yang bersifat umum dipandang perbuatan terpuji bagi pelakunya, dan status hukumnya sunat. Tetapi shadaqah terhadap harta tertentu dengan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula adalah suatu kewajiban. Shadaqah demikian status hukumnya wajib. Shadaqah dalam pengertian inilah yang lazim disebut zakat, dan ia menempati rukun Islam yang ketiga.⁵

Sekalipun zakat merupakan perintah Allah yang wajib ditunaikan, tetapi sebenarnya kewajiban itu khusus ditujukan kepada individu yang memiliki sejumlah kekayaan yang telah sampai nisabnya. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak yang digandeng dengan perintah mendirikan shalat.⁶ Hal itu memberikan indikasi bahwa kedua perintah itu mempunyai arti sangat penting bagi manusia, terutama relevasinya dengan kehidupan bermasyarakat.

Shalat dipandang sebagai tiang agama dalam Islam. Mendirikannya berarti menegakkan agama, dan meninggalkannya berarti turut menghancurkan agama. Karena itu, wajar kalau al-Qur'an mengancam dengan sanksi berat bagi yang melalaikannya. Kalau shalat merupakan tiang agama, maka zakat dipandang sebagai sumber ekonomi dalam Islam. Karena itu wajar Abu Bakar memerangi orang yang engkar membayar zakat. Dengan shalat orang dekat dengan Allah dan semakin baik moralnya, sementara ibadah zakat menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Shalat dipandang sebagai ibadah badaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah. Keduanya mempunyai kedudukan sama pentingnya. Menyadari akan pentingnya masalah harta

(materi) bagi kehidupan manusia, maka wajar Abdul Wahab Khalaf menempatkannya sebagai salah satu unsur dharuriy dalam Islam.⁷ Dengan demikian, dari satu sisi Islam menghendaki agar manusia dekat dengan Allah melalui shalat, tetapi di sisi lain Islam juga menginginkan agar manusia peduli dengan sosial lingkungannya dan memperhatikan keadaan saudaranya melalui zakat. Karena zakat merupakan sumber ekonomi potensial umat Islam.

C. Sekilas Zakat dalam Perdebatan

Ada dua macam zakat yang di kenal dalam Islam, yaitu zakat jiwa (fitrah) dan zakat harta (mal). Nampaknya kedua macam zakat ini memang berbeda, baik dari segi harta yang dizakatkan yaitu benda yang dizakatkan, mampu yang terkena wajib zakat. Dalam makalah ini tidak membahas berkenaan dengan zakat jiwa (fitrah) secara utuh, perhatian penulis lebih banyak diarahkan pada zakat harta⁸ karena zakat fitrah tidak banyak menimbulkan masalah yang mendasar.

Zakat adalah suatu kewajiban atas harta tertentu yang telah memenuhi ukuran, diperuntukkan kepada ashnaf sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jenis harta yang telah disepakati terkena zakat adalah a. binatang ternak berkaki empat (unta, sapi atau kerbau dan kambing), 2. Logam mulia (emas dan perak). 3. Biji-bijian dan buah-buahan (gandum, sawi, korma dan anggur), 4. Barang dagangan dan 5. Barang temuan (rikaz). Adapun nash sebagai sandaran atau dasar hukum wajib zakat harta-harta tersebut bervariasi. Perintah untuk menunaikan zakat berlaku secara umum dalam Al-Qur'an. Hanya ada beberapa harta yang disebut ayat misalnya tentang emas dan perak dalam Q,9:35 At-Taubah, buah-buahan dan biji-bijian tertera dalam Q,6:141 Al-An'am. Sandaran hukum lainnya adalah

hadis Nabi Muhammad, bahkan ada atsar dari Umar bin Khattab berkenaan dengan barang perdagangan.

Terdapat pula suatu kecendrungan pada sementara ulama bahkan dikalangan cendikiawan muslim untuk melibatkan semua harta ke dalam institusi zakat harta. Sementara itu banyak pula ulama dan cendikiawan muslim tidak tertarik dengan cara demikian, sehingga zakat itu terbatas pada jenis yang disebut nash saja. Hal ini memang cukup menarik perhatian kita. Ibnu Rusydi,⁹ mengemukakan pangkal silang pendapat itu bertolak dari apakah zakat itu merupakan ibadah seperti halnya shalat dan puasa ataukah hak fakir miskin. Nampaknya segi mu'amalah dengan segala aspeknya lebih mendominasi dari segi ibadahnya.

Ketentuan besarnya kewajiban zakat yang telah disepakati 2,5 % untuk emas, perak dan harta perniagaan, 10 % hasil tanaman pokok (gandum, korma dan padi) dan 5 % kalau menggunakan irigasi, 20 % harta temuan, dan binatang ternak (unta 25-30 ekor = 1 ekor, sapi/kerbau 30 ekor = 1 ekor dan kambing 40 ekor = 1 ekor).

Syarat orang yang terkena zakat, muslim, merdeka, baligh berakal, sampai nisab dan milik sempurna. Syarat-syarat ini disepakati ulama.

Di samping harta yang disepakati, masih terdapat sejumlah harta kekayaan yang belum disepakati. Artinya, apakah wajib dizakati atau tidak. Umpamanya, mutiara, kelapa, cengkeh, kopi, pala, tebu, angrek, gaji pegawai, profesi dan lain-lain. Posisi harta tersebut sangat besar manfaatnya dalam menompang kehidupan manusia.

Ulama 'klasik' tidak membicarakan hal itu di dalam kitab-kitab mereka secara rinci. Persoalan ini muncul kepermukaan seiring dengan kemajuan zaman. Sementara ulama "Mutaakhirin" ada kecendrungan

memasukkan jenis-jenis harta tadi menjadi wajib zakat. Alasannya, karena harta tertentu merupakan potensi kehidupan.

D. Kedudukan Zakat dalam Islam

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah zakat itu merupakan *ibadah makkhdah* atau tergolong ke dalam mu'amalah dalam arti luas. Apabila zakat itu termasuk *ibadah makhdah* masih perlu dipertanyakan sejauhmana hukum qiyas diberlakukan di sini.

Agaknya tidak ada perbedaan pendapat sampai kini dikalangan ulama bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Tetapi dirasakan perlunya untuk menegaskan apakah kelima rukun Islam itu *ibadah makhdah*. Ataupun dapat dikategorikan kedudukan ibadah makhdah itu kepada ibadah makhdah mutlak dan relatif. Relatif dalam pengertian bahwa posisi ibadah demikian lebih berorientasi kepada masalah sosial seperti zakat yang kita bicarakan sekarang ini. Atau dengan berani kita mengatakan bahwa zakat itu adalah suatu ibadah sosial (ibadah ijtima'iyah) yang termasuk dalam ruang lingkup mu'malah. Oleh karena itu pelaksanaan zakat ini dapat diatur (diperkuat) melalui sistem perundang-undangan. Sanksi terhadap orang Islam yang melalaikan kewajiban zakatnya dapat berupa sanksi perdata atau dapat juga ketingkat sanksi pidana. Abu Bakar agaknya telah membuat semacam jurisprudensi dalam hal ini dengan memerangi orang Islam yang mengingkari kewajiban zakatnya, seraya mengecap mereka sebagai muslim yang murtad.

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa zakat itu adalah *ibadah makhdah*.¹⁰ Itulah sebabnya mengapa tidak mewajibkan zakat pada harta anak-anak, ahli zimmi, budak dan orang gila.

Imam mazhab yang lain tidak menolak pendapat Abu Hanifah, tetapi berbeda pendapat berkenaan zakat harta anak-anak, orang gila, ahli zimmi. Kalau memang zakat ini merupakan *ibadah makhdah* mengapa budak tidak terkena wajib zakat, sebab budak itu terkena juga wajib shalat dan puasa ? Memang seorang budak disatu segi sama dengan harta, tetapi di sisi Allah tidaklah demikian. Mereka berhak masuk surga dengan amal ibadahnya, sama seperti orang merdeka lainnya. Akhirnya tiada lain yang dapat disimpulkan bahwa Imam lainnya memandang juga zakat itu sebagai *ibadah makhdah*.¹¹

Kemajuan yang dicapai manusia banyak membawa perubahan dalam mata pecaharian. Sehubungan dengan itu terlihat kecenderungan memandang zakat sebagai suatu hukum Islam yang bersifat kontemporer dan kondisional. Kalau demikian halnya masih dimungkinkan apabila zakat itu tidak dikategorikan dalam kelompok ibadah makhdah seperti shalat dan puasa tetapi kita kelompokkan ke dalam ibadah ijtimaiah dalam wawasan Fiqh Mu'amalat. Dengan jalan ini, maka kelima rukun Islam itu dua di muka dan dua di belakang adalah ibadah makhdah, dan di tengah-tengah adalah *ibadah ijtimaiah maliyah*.

Melihat situasi ekonomi kaum muslim di dunia, khususnya di Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang amat memerlukan dana pembangunan, maka menempatkan zakat sebagai ibadah ijtimaiah (ibadah sosial) dalam lingkungan Fiqh Muamalat, bersifat kontemporer dan kondisional, adalah suatu yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹² Dari segi lain, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jenis harta yang dizakati nampaknya tergolong nash-nash rasional (*ma'qulatu al ma'na*). Nash-nash *al-ma'qulatu al ma'na* bukan statusnya ibadah semata, nash-nash itu mempunyai ilat dan hikmah hukum.

E. Kesimpulan

Konsep zakat disepakati dalam Islam adalah kewajiban bagi orang yang mampu mengeluarkan jumlah tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dan haul, serta didistribusikan kepada asnaf yang telah ditentukan Syara'. Harta yang terkena wajib zakat itu adalah buah-buahan, biji-bijian, emas, dan perak, hewan ternak (unta, sapi, kerbau dan kambing), harta perdagangan, galian dan barang temuan (rikaz). Orang yang terkena wajib zakat ialah Islam, dewasa, berakal, merdeka, milik sempurna, sampai nisab dan haul. Persentasenya 2,5%, 5%, 10% dan 20% dari jumlah harta terkena zakat. Disamping itu, terdapat pula sejumlah harta yang belum disepakati wajib zakatnya diluar yang telah disebutkan di atas. Jenis harta tersebut dipandang sebagai potensi ekonomi dan penunjang kehidupan.

Mengenal kedudukan zakat dalam Islam terjadi silang pendapat. Ulama klasik memandang zakat sebagai ibadah Mahdhah dan termasuk rukun Islam, karena itu jenis harta yang terkena wajib zakat terbatas pada yang disebut nash.

Konsekwensinya penggunaan qiyas terbatas.

Ulama "Mutakhirin" cenderung melihat zakat sebagai ibadah sosial (ghairu mahdhah). Hal ini memberi ruang gerak yang luas dalam penggunaan qiyas, sehingga banyak jenis harta yang terkena wajib zakat.

Terlepas dari silang pemikiran itu, yang pasti zakat adalah sumber dana potensial bagi umat Islam, yang harus dikelola dengan baik. manajemen yang handal dan ditangani secara proporsional sehingga zakat dapat berperan mengatasi problematika umat Islam.

Kita merasa prihatin bahwa zakat yang merupakan sumber dana umat Islam yang potensial ini ternyata belum memasyarakat. Kesadaran

umat Islam yang mampu menunaikan rukun Islam yang ketiga yang merupakan tulang punggung tegaknya kesejahteraan umat Islam masih belum menggembirakan.

Sementara itu disisi lain segi pengelolaan dan pendayagunaannya masih sangat “menyedihkan”. Pengelolaan zakat masih banyak yang ditangani secara individual tradisional dengan cara yang berbeda, tidak mempunyai manajemen dan organisasi yang baik.

Penggunaan zakat masih banyak bersifat konsumtif. Tidak produktif, sehingga zakat nampak kurang efektif dalam memecahkan problematika social kemasyarakatan. Ini semua, antara lain, karena kita sering terpaku dengan rumusan-rumusan *fiqh* dan mengikutinya secara harfiah.

Semua masalah ini harus dipecahkan apabila kita benar-benar menginginkan agar zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana ekonomi umat Islam. Pengelolaan zakat harus mendapat perhatian dari semua pihak dan ditangani secara profesional dengan manajemen handal.

Endnotes:

- ¹ Tata nilai dalam Islam tidak hanya mengatur perilaku kehidupan duniawi, tapi juga untuk kehidupan ukhrawi, kehidupan di dunia adalah jembatan untuk kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, tata nilai dalam ajaran Islam mempunyai dimensi vertikal yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan dimensi horizontal yaitu hubungan manusia sesamanya atau dengan alam lingkungannya. Bandingkan dengan *Q*, 3:112 dan lihat juga *Q*, 2:61.
- ² Rahmad Zaenuddin, *Zakat, Implikasi Pada Pemerataan*, dalam Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta, Yayasan Pramadina, 1994, hal. 436
- ³ Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat*, terj. Jakarta. Litera Antarnusa, 1987, hlm. 34. Bandingkan Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terj. Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235
- ⁴ Konsep zakat yang dirumuskan oleh para Ulama memberi kesan bahwa kesemuanya itu bermuara untuk terwujudnya masyarakat Islam yang kokoh. Semua orang dapat hidup dalam keadaan layak, karena kepentingan primer telah terpenuhi. Bandingkan, Abdul Karim At-Tawati, *Maqhum Az-Zakah wa "Ab-aduha wa Hikmatu Tasyri'iha fi al-Islam*, al-Manhal No. 447, 1986, hlm. 28
- ⁵ Kelima rukun Islam itu adalah dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan naik haji, Rasyid Ridha, *Hajmuatu al-Hadis*, Mathabi'I al-Arabat, 1383, hlm. 22
- ⁶ Dalam al-Qur'an terdapat 32 kali ayat yang menggandengkan perintah shalat dan zakat Hasbi Ash-Shaddiqiy, *Perbendaharaan Zakat*, Bandung, Al-Ma'arif, 1952, hlm. 11
- ⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushui Fiqh*, Jakarta, al-Majalis al-A'la al-Indonesia li al-Da'wati al-Islamiah, 1972. Hlm. 200
- ⁸ Zakat Fitrah disyari'atkan tahun ke dua Hijrah, dua hari menjelang puasa berakhir. Zakat ini dikhususkan untuk menanggung fakir miskin. Fitrah (zakat) berkaitan dengan amal puasa, tetapi siapapun di anatar orang Islam yang hidup disaat sebelum shalat hari raya, terkena wajib

zakat. Berbeda dengan zakat harta yang disyari'atkan delapan bulan kemudian, sasaran zakat fitrah adalah makanan pokok dan semua kaum muslim. Zakat harta terbatas pada harta tertentu dan jangka waktu tertentu pula, tidak diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin.

⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit.*, hlm. 13. Bandingkan Abdur rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972. Hlm. 591

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziry, *Ibid.*

¹¹ Dewasa ini masih dianut oleh umat Islam bahwa zakat itu merupakan ibadah makhdah, Hasbi Ash-Shiddiqiy, *op.cit.*, hlm. 4. Menamakannya sebagai ibadah maliyah, shalat dan puasa sebagai ibadah badaniyah, sedangkan haji sebagai ibadah badaniyah maliyah.

¹² Bandingkan Shobhi Mahmashaniy, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, al-Ma'arif, Bandung, 1981, diterjemahkan Ahmad Soejono, SH. Hlm. 166-184.

Hajar Hasan, Dosen Tetap Fakultas Syariah IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Menekuni Kajian Pranata Sosial Hukum Islam. Alumnus Program Pascasarjana Ar-Raniri Banda Aceh,